



KEMENKUMHAM RI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

SEMAKIN *PASTI* MENUJU INDONESIA MAJU
Pertanian, Kelautan, Energi, Transportasi dan Logistik

BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



**KUMHAM REFORMASI
PASTI HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 ini telah selesai disusun. LKIP tahun anggaran 2021 ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun Anggaran 2021.

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2021. Sementara itu Perjanjian Kinerja merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Hasil yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2021 dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini adalah, (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak – pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/ stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan disusunnya LKIP Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2021 kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.



Pangkalpinang, 5 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ANAS SAEFUL ANWAR, Bc.IP., M.Si

NIP. 19620219 1986 03 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN	18
BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA.....	
A. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	26
B. PERJANJIAN KINERJA.....	33
C. TARGET KINERJA	45
D. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. CAPAIAN KINERJA.....	56
1. PERJANJIAN KINERJA	57
2. TARGET KINERJA.....	72
B. REALISASI ANGGARAN.....	95
BAB IV PENUTUP	
1. KESIMPULAN.....	98
2. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	101

LAMPIRAN

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau yang sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja selanjutnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat mendorong terlaksananya kinerja pemerintahan yang transparan, efektif serta mengedepankan efisiensi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung hampir memenuhi target dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 (per 31 Desember 2021) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 9 DIPA adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (9 DIPA)
DIPA (Rp) : Rp 20.574.791.000,- Realisasi (Rp) : Rp 20.493115.409,-
Persentase (%) : 99,60%
2. Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (11 Satker)
DIPA (Rp) : Rp 75.570.766.000,- Realisasi (Rp) : Rp 72.830254.444,-
Persentase (%) : 96,37%
3. Realisasi Anggaran Keseluruhan (9 DIPA dan 11 Satker)
DIPA (Rp) : Rp 96.145.557.000,- Realisasi (Rp) : Rp 93.323.369.853,-
Persentase (%) : 97,06%

Dengan demikian agar terpenuhinya sasaran tersebut yang menjadi target rencana program / kegiatan pada tahun 2021 adalah Melaksanakan 9 DIPA/ Program antara lain:

- Program Dukungan Manajemen
- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- Program Pembentukan Regulasi
- Program Pemajuan dan Penegakan HAM

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah (KANWIL) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang.

Terselenggaranya good governance merupakan syarat bagi setiap pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas–asas umum penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya good governance juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang–undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa pengguna anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Dalam hal ini kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kepulauan Bangka Belitung membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021.

Dalam melaksanakan kinerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu kementerian Hukum dan HAM RI sebagai instansi vertikal telah mengeluarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-972.PR.01.01 tanggal 18 Februari 2021.

Di dalam rencana strategis tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020 - 2024. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran Strategis tersebut antara lain :

1. Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan, Bermanfaat dan Berkepastian Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang Mudah, Cepat, dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat;
3. Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat;
4. Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM;
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;

Dalam melaksanakan 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 sebagai perwujudan Laporan yang akuntabel dan tepat sasaran.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang – Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan.
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.
- d. Perlindungan, pemajuan, penuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.
- e. Pelayanan hukum .
- f. Pengembangan budaya hukum dan diseminasi hak asasi manusia.
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan kantor wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
5. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan;
6. Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sungailiat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang;
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Pangkalpinang;
10. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Pangkalpinang;
11. LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) Kelas III Pangkalpinang;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengertian unit pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah satuan tugas yang bersifat mandiri yang melakukan tugas teknis operasional tertentu dari organisasi induknya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu :

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Keimigrasian
3. Divisi Pemasyarakatan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dijelaskan sebagai berikut :

I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. pengkoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah;

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

1) Bagian Program dan Humas

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya bagian Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
4. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian penyusunan program dan laporan dibantu oleh :

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta

penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2) Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Bagian umum dibantu oleh :

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah, divisi pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bantu :

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pembinaan, Bimbingan dan

Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dibantu oleh :

- a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.
 - b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantuan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan tugas teknis di bidang tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan dibantu oleh :

1. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan keamanan dan pelayanan pengaduan.
2. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan unit Pelaksana Teknis imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi keimigrasian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumentasi perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian dan status kewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
- Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian Keimigrasian dibantu oleh :

- (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.

- (2) Sub Bidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana prasarana komunikasi keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Keimigrasian dibantu oleh:

1. Subbidang Intelijen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, dan rumah detensi.

2. Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pelaksanaan tugas teknis di Bidang Penindakan dan rumah detensi.

IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Kepala Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pengembangan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang perundang – undangan dan penyuluh hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan balai harta peninggalan.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancangan perundang – undangan dan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan divisi administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan

hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Pelayanan Hukum di bantu oleh :

1. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaries, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, serta pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.
 2. Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaandan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluhan hukum di wilayah.
- 2 Bidang Hukum
- Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi

serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan perancang perundang – undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Hukum menyelenggarakan :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dan dokumentasi dan informasi hokum, penyiapan bahan perancang perundang – undangan di wilayah serta bimbingan teknis.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pengembangan perancang perundang – undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

Bidang Hukum dibantu oleh :

1. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program legilasi daerah dan naskah akademik, fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, peta permasalahan hukum, pengkajian/penelitian hukum daerah, serta pengembanagn perancang perundang – undangan di wilayah.
2. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalaian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah propinsi dan kabupaten / kota.
3. Bidang Hak Asasi Manusia
Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil

pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang hak asasi manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, pengkajian dan penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, pengkajian dan penelitian, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh :

1. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.
2. Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan komunikasi masyarakat dan pengkajian dan penelitian hak asasi manusia serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.



D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan capaian kinerja karena dampaknya yang signifikan bagi satuan kerja dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mencapai Kinerja Pemerintahan yang baik telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek kinerja yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
DIVISI ADMINISTRASI		
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Akun Antigen/PCR	Adanya penurunan harga untuk Test Antigen/PCR berimbas pada Pemakaian Akun untuk Test Antigen/PCR yang berlebih tidak bisa direvisi sehingga anggaran yang bersisa tidak bisa dioptimalkan
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji (Penghasilan) PPNPN belum sesuai dengan UMP dan/atau PMK Standar Biaya Masukan 2. Belum terlindunginya PPNPN oleh BPJS Ketenagakerjaan 3. Tidak Ada nya postur anggaran Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian dan Tata Usaha pada UPT 4. Belum maksimalnya penggunaan anggaran pemeliharaan kendaran dinas
	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk keperluan pengarsipan yang baik dan aman (lemari penyimpanan arsip)
	Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Sosialisasi RKAKL 2. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk pemeliharaan/renovasi gedung
Subbagian Program dan Pelaporan	Adanya pandemi covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami <i>refocusing</i> anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan sesuai dengan waktunya 2. Selama pandemi covid-19 seluruh kegiatan menggunakan aplikasi zoom dimana dirasa kurang maksimal dalam kegiatan yg mengharuskan tatap muka bersama satuan kerja
	Aplikasi e-Monev dan SMART DJA	Belum adanya <i>User ID</i> bagi Kantor Wilayah yang dapat digunakan sebagai Monitoring penginputan aplikasi e-Monev dan SMART DJA pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

	Pelaporan	Belum adanya keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga menjadi temuan Inspektorat Jenderal
Subbagian Reformasi Birokrasi Humas, dan TI	Pelaksanaan kehumasan selama pandemi covid 19 menurun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang/ ditiadakan selama masa pandemi covid 19, diubah pelaksanaannya hanya secara virtual 2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang Humas. Perangkat yang sangat dibutuhkan saat ini adalah lisensi freepik yang mengakomodir download ilustrasi dan elemen desain sehingga dengan berkembangnya TI yang begitu cepat dapat mendukung terhadap kinerja Humas
	Kualitas SDM perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. perlu dilaksanakan diklat & bimtek bagi pegawai khususnya tentang keprotokolan, kehumasan, dan teknologi informasi 2. kurangnya JFT Pranata Humas yang berperan sebagai agen yang bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas karena berbagai informasi harus dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat
DIVISI KEIMIGRASIAN		
Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi masa Pandemi Covid-19 pelayanan keimigrasian harus tetap dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 bagi petugas dan pemohon layanan Keimigrasian. 2. Bagaimana inovasi di Masa Pandemi Covid-19 agar meningkatkan PNBP dengan mendorong masyarakat untuk membuat Paspor
Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan	Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
Bidang Hukum	Pembinaan dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pandemi Covid-19 membuat pembinaan Desa Kadarkum menjadi terhambat. 2. Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum terlalu efektif dalam pembinaannya disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM yang tersedia. 3. Anggaran pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan binaan yang terdampak dengan adanya realokasi anggaran untuk Covid-19
	Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya terdapat 6 OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM di Prov. Kep. Bangka Belitung sehingga penyerapan anggaran pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal dan terdapat 1 OBH dari 6 yang terverifikasi yang pada tahun ini dalam pengawasan sehingga tidak memperoleh anggaran dana bantuan hukum tahun 2021; 2. Dari semua OBH yang terakreditasi tersebut, semuanya berkedudukan di pulau Bangka, sehingga akses terhadap bantuan hukum di khususnya pulau Belitung tidak optimal dalam pelaksanaannya; 3. Kurangnya perhatian dari para LBH/LSM/ORMAS kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Prov. Kep. Bangka Belitung; 4. Belum tercapainya pemberian bantuan hukum sampai ke desa-desa di pulau-pulau terpencil di Prov. Kep. Bangka Belitung.
	Prolegda/Propemperda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Kabupaten/Kota belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan Prolegda dan bagaimana pelaksanaannya penyusunannya. 2. Monitoring Prolegda tidak dapat dilakukan di Kabupaten/Kota, dan hanya melalui surat, sebagai akibatnya ada surat yang dibalas dan ada yang tidak, sehingga data terlambat untuk direkapitulasi. 3. Pelaksanaan Prolegda di setiap daerah masih belum sesuai dengan

		UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani.
	Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya dana koordinasi ke Ditjen PP dalam rangka konsultasi; 2. Sarana dan Prasarana seperti ruang rapat untuk harmonisasi dan penyusunan Naskah Akademik tidak tersedia secara permanen; 3. Masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah yang disebabkan oleh ego sektoral;
	Analisa dan Evaluasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang tersedia masih minim untuk pelaksanaan koordinasi ke Kab/Kota; 2. Belum maksimalnya pelaksanaan di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari pelaksana, karena merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2021; 3. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari berbagai instansi/stakeholder terkait, namun tidak berjalan sebagaimana semestinya.
	Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Koordinasi Instansi terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung masih kurang; 3. Otomasi belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran; 4. Ruang JDIH belum representatif (terbuka), sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal; 5. Belum maksimalnya pengelolaan <i>website</i>, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi.

<p>Bidang Pelayanan Hukum dan HAM</p>	<p>Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda pada awal tahun, menjadi kendala terbesar dalam pelayanan AHU dan KI 2. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19 3. Belum adanya juklak dan juknis tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan koordinasi partai politik sehingga mengalami kendala di dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan. 4. Rendahnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hal tersebut disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya Kekayaan Intelektual terhadap sebuah produk. 5. Minimnya operator pendaftaran 6. Kekayaan Intelektual maupun Administrasi Hukum Umum.
<p>Bidang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pelayanan Masyarakat Komunikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Yankomas Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung; 2. Ada beberapa pengaduan yang masuk akan tetapi pada saat akan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaian para pihak yang berwenang tidak hadir. 3. Keberadaan Pos Yankomas yang masih terbatas, karena hanya dibentuk pada UPT baik Imigrasi maupun Pemasarakatan. 4. Masih minimnya operator aplikasi SIMASHAM.
	<p>Telaah Perda Berperspektif HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang tersedia masih minim; 2. Hasil rekomendasi yang tidak tepat sasaran; 3. Tema yang tidak faktual; 4. Jumlah staf pada bidang subbidang Pelayan, Pengkajian dan Informasi HAM sangat kurang (hanya 1 orang).
	<p>Diseminasi HAM</p>	<p>Minimnya anggaran pelaksanaan DISEMINASI HAM sehingga dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun</p>

	Rakor Aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah tentang Aksi HAM; 2. Pada saat terjadi mutasi tugas, Pemda sering berganti jabatan dan lemahnya pemahaman program Aksi HAM sehingga menyebabkan program Aksi HAM tidak dilaksanakan secara optimal.
	Monev Aksi Ham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya implementasi Aksi HAM di setiap Kabupaten / Kota; 2. Masing-masing SKPD belum mempunyai program Aksi HAM serta masih lemahnya pemahaman program Aksi HAM; 3. Jumlah staf pada subbidang diseminasi HAM masih kurang; 4. Program kerja tidak berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun awal tahun;
DIVISI PEMASYARAKATAN		
Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi Dan Kerjasama	Pembinaan, Teknologi Informasi Dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalanya keterbatasan Sarpras untuk pembinaan kemandirian kegiatan kerja di Lapas; 2. Terkendalanya Koneksi jaringan khusus SDP yang sering error (jaringan server SDP) sehingga menghambat ketika verifikasi usulan Remisi dan usulan integrasi; 3. Tidak terkoneksinya jaringan antara UPT dengan Instansi Penegak Hukum terkait pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu teknologi informasi (SPPT-TI); 4. Terkait Asimilasi rumah, tidak adanya WBP yang bekerja diluar LAPAS sehingga pencapaian PNPB berkurang; 5. Jika akan mengadakan Mou antara Kanwil dan Dinas Tenaga Kerja, waktu dan birokrasi yang panjang
Sub Bidang Bimbingan Dan Pengentasan Anak	Bimbingan Dan Pengentasan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya tempat penahanan bagi Anak baik itu di LPAS maupun LPKS sehingga penahanan bagi anak dilakukan di Rutan Kepolisian (bertentangan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA) 2. Masih adanya klien masyarakat yang sulit dihubungi pada saat

		<p>pembimbingan dan pengawasan, sehingga PK melaksanakan <i>home visit</i>,</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih kurang maksimalnya kegiatan yang diberikan oleh Pokmas Lipas di Tahun 2021 sebagai akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Masih ada kendala dalam penginputan fitur Litmas SDP Bapas. Masih adanya anak yang berusia diatas 18 Tahun, namun masih terdapat di LPKA.
Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan Dan Rehabilitasi	Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan Dan Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan yang sudah ada memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan, Penjamah Makanan, Tata Boga dan Jasa Boga. Sebagian belum di Uplod Ke aplikasi Simonev Bama. Laporan dari upt Pemasarakatan kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Bangka Belitung yang belum ada mengikuti Pelatihan sertifikat Higiene Sanitasi Makanan, Penjamah Makanan, Tata Boga Jasa Boga
Sub Bidang Pengelolaan Basan Baran Dan Keamanan	Pengelolaan Basan Baran Dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran pemeliharaan dan pengamanan basan baran. Tidak ada Penambahan Pegawai sehinggalan untuk tenaga Teknis dan tenaga penjagaan kurang.(Tenaga Penjagaan hanya 2 orang dan dibantu dibantu sementara dengan bantuan piket staff yang ada untuk antisipasi kekurangan penjagaan khususnya. Masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi oleh petugas Lapas/Rutan dalam Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan. Eksekusi terhadap barang bukti terlambat. Kurang pemahaman kedisiplinan petugas Lapas/Rutan/LPKA.

BAB II

PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline.

SS 1 – Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan,bermanfaat dan berkepastian hukum

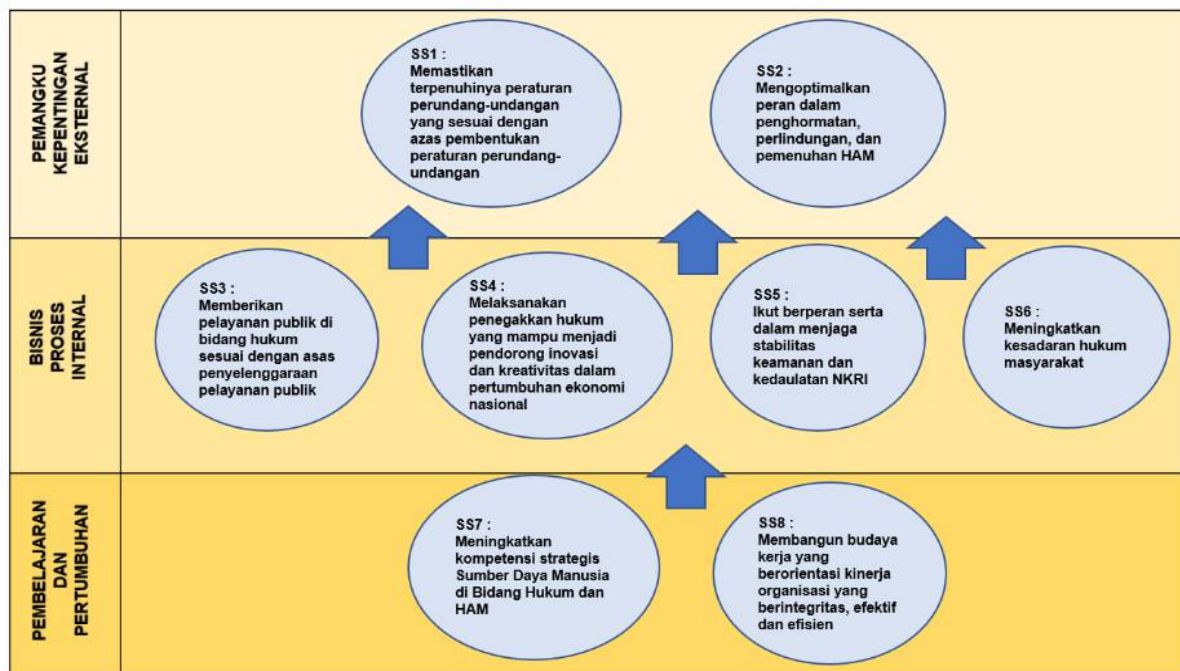
SS 2 – Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

SS 3 – Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

SS 4 – Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

SS 5 – Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :



Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

Sasaran RPJMN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas perundang-undangan

<p>Terselenggara system peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel</p>		<p>2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas</p>	<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</p>	<p>SS3: Memberikan pelayanan publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum</p>
<p>Terbentuknya sistem antikorupsi yang optimal</p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p>

			tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

B. Perjanjian Kinerja

Setelah Nilai persentase target suatu Perencanaan Kinerja ditentukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2020 - 2024 pada tabel sebelumnya, diturunkan Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh masing-masing Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I tersebut, menyusun Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah pada awal Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap Laporan Kinerja.

TABEL PERJANJIAN KINERJA 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DENGAN ESELON I

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2021	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal			
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	Rp. 13.792.510.000
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	Rp.24.416.551.000
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	

	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%
	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%

	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
Direktorat Jenderal Imigrasi			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	Rp 9.461.525.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	

	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum			
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Rp. 1.858.350.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual			
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Layanan	Rp. 753.549.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	
Direktorat Jenderal Perundang-Undangan			
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Rp. 172.285.000,-
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia			
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	Rp.242.497.000
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik	1 Instansi Pemerintah	

	berbasis HAM		
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Rp 920.279.000,-
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Rp. 203.065.000
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	

TABEL PERJANJIAN KINERJA 2021
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2021	Anggaran (Rp)
Lembaga Pemasyarakatan			
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	60%	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang : 9.469.896.000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	Lapas Kelas II Narkotika Pangkalpinang 15.432.901.000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan 6.148.707.000
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	Lapas Kelas IIB Sungailiat 7.917.169.000
	Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang 4.507.703.000
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindak lanjuti Sesuai Standar	75%	
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak ,Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	71%	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat	95%	

	akses layanan kesehatan maternal		
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	Nilai IKPA	100%	
	Nilai SMART	100%	
Lembaga Pembinaan Khusus Anak			
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	4.965.565.000
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	

	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	
	Meningkatnya Anak yang memperoleh Hak Remisi	100%	
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	
	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan non formal	70%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	

	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
	Tersusunnya data dokumen pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
Rumah Tahanan Negara			
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	5.047.721.000
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia	75%	

	yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
Balai Masyarakat			
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	2.749.284.000
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90%	
	Persentase Pelanggaran	1%	

Lembaga	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat		
	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	75%	
	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	
	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di Lingkungan Masyarakat	75%	
	Persentase Klien Pemasarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan Restoratif	36%	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara			
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60%	1.602.881.000
	Pesentase Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasar putusan yang berkeuatan hukum	40%	
	Proses Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	60%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dn Ketertiban	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	

	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%	
	Persentase Pmulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
Meninkanya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	
	terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan Tepat waktu	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	Nilai IKPA	100%	
	Nilai SMART	100%	
Kantor Imigrasi			
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang 7.923.209.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan 5.738.627.000
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	

C. Target Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 27 Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN
KEPALA KANTOR WILAYAH		
1	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1.Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP 2.Implementasi Manajemen Risiko(MR)
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Pemeriksaan BPK
3	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi Corporate University	1. Meningkatnya kapasitas SDM di wilayah 2. Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah
4	Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)	1. Tersedianya data informasi seluruh pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP 2. Tersusunnya Pedoman Pengisian Sistem Informasi Pelayan Publik (SIPP)
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI		
5	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi	Indeks RB minimal Sangat Baik (>78-90)
6	Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Digitalisasi Arsip 2. Dimusnahkannya Data Arsip Inaktif yang sudah memasuki masa retensi
7	Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid 19
8	Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui SIPaSTIKU
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
9	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah
	Menciptakan kondisi / iklim usaha	1. Terciptanya pemahaman pelaku usaha /

10	yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi	korporasi terkait kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di wilayah 2. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah
11	Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah	Terciptanya pemahaman masyarakat di wilayah tentang pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK
12	Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah	Optimalisasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah
13	Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah	Optimalisasi Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah
14	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden
15	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM
16	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang Cipta Kerja	Tersusunnya rekomendasi terhadap status produk hukum daerah yang terkait dengan Undang- Undang Cipta Kerja baik perubahan, penggantian, pencabutan dan/atau pengintegrasian/ simplifikasi berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan
17	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	Terpenuhinya Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) secara Kuantitas dan kualitas
18	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK- IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	Rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK- IKM) serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan

		kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah
19	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Termanfaatkannya data SIPKUMHAM dalam menyusun kebijakan di wilayah
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN		
20	Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan	Menurunnya jumlah overstaying tahanan dan overload Basan Baran dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum
21	Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan stakeholder	Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi
22	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	Tahanan/ Narapidana/ Anakpecandu dan penyalahguna narkotika memperoleh layanan Rehabilitasi Narkotika
23	Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Optimalisasi fungsi kelompok masyarakat (Pokmas)
24	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan	1. Meningkatnya Koordinasi pengamanan dengan instansi terkait
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar
		3. Inspeksi mendadak, tes urin bagi petugas dan narapidana/ tahanan/anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas maximum security
		4. Validasi dan akurasi data keamanan
		5. Lapas dan Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) sesuai Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat
25	Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/ Bapas Pilot Project	Pelaksanaan pertukaran data berbasis Teknologi Informasi dengan antar institusi penegak hukum melalui SPPT-TI
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN		
26	Pelayanan <i>Eazy Passport</i>	Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan <i>Eazy Passport</i>

27	Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Kegiatan rapat Timpora Tingkat Provinsi2. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran WNI/ WNA
----	--	---

D. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	80%	85%	90%	95%	100%
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	80%	85%	90%	95%	100%
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham	80%	85%	90%	95%	100%
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	95%	96%	97%	98%	99%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	70%	70%	70%	70%	70%
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	25%	20%	15%	10%	5%
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%	80%	80%
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	54 Orang	54 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	10 Raperda	12 Raperda	10 Raperda	10 Raperda	10 Raperda
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	-	49	53	56	60
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	-	87,5	90	92,5	95
	Indeks keberhasilan program pembinaan klien pemasyarakatan	-	40	50	60	70
	Indeks pembinaan khusus anak	-	60	68	74	84
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	-	60	70	80	90
	Indeks Pelayanan Tahanan	-	60	70	80	90
Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	-	70	75	80	85
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	-	73	78	83	88

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2021.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja untuk Laporan Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2021 ini dihitung berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Fisiknya, yang bisa dicapai pada Tahun Anggaran 2021.

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

1. PERJANJIAN KINERJA

N O	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Sekretariat Jenderal					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.5	114%
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan					
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	80	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	60%	100%
		Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	40%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	100%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	97%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	75%	100%

		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	13%	100%
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	25%	100%
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	62%	100%
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	40%	100%
		Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	50%	100%
		Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	25%	100%
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	70%	100%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	70%	100%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	70%	100%
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses	95%	95%	100%

		layanan kesehatan maternal			
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%
Direktorat Jenderal Imigrasi					
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,92	124%
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,93	126%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,91	126%
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum					
11	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	4 %	80 %
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	82 %	100 %
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual					
12	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Layanan	34 Permohonan	212 %
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	3 Lokus	300 %

	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100 %	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Direktorat Jenderal Perundang-Undangan					
13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	10 Raperda	26 Raperda	260 %
	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	30 orang	210 %
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia					
14	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	7 Intansi Pemerintah	350 %
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	Pada Tahun 2021 ditiadakan	-
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	10 Instansi	1000 %
	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%
Badan Pembinaan Hukum Nasional					
15	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 kegiatan	100%
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	77 %	100%

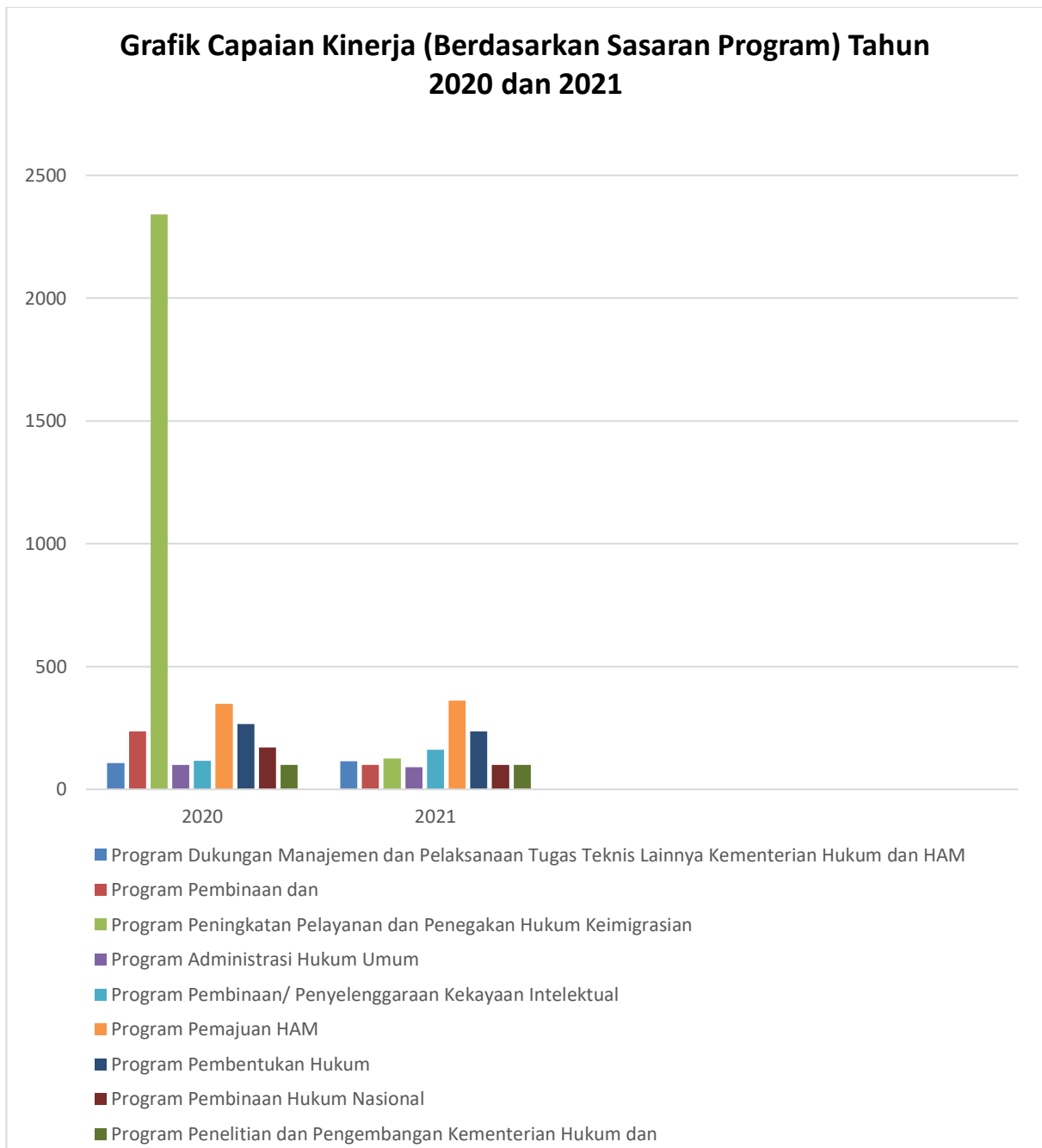
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	79 %	100%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76.61 %	100%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70 %	100%
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20 %	100%
Badan Penelitian dan Pengembangan					
1 6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70 %	100 %
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %

Berdasarkan Tabel diatas, dari 16 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah dan 48 Indikator Kegiatan Kantor Wilayah, Nilai Capaian Indikator Kegiatan yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 45 Indikator Kegiatan Kegiatan yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
2. Terdapat 8 Indikator Indikator Kegiatan yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2021 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
3. Terdapat 1 Indikator Kegiatan yang Nilai Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 kurang dari target (dibawah 100%) yaitu 80% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2020 dan 2021

No	Program	Sasaran Program	Capaian 2020	Capaian 2021	Status
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	107%	114%	Naik 7%
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Penyelenggaraan Masyarakat di wilayah	236%	100%	Turun 136%
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di wilayah	2.340%	125%	Turun 2.215%
4	Program Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	100%	90%	Turun 10%
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di wilayah	117%	162%	Naik 45%
6	Program Pemajuan HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah	348%	362%	Naik 14%
7	Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di daerah	265%	235%	Turun 30%
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	170%	100%	Turun 170%
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	100%	100%	Tetap



Rata – Rata Nilai Capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 154% (serratus lima puluh empat persen), menurun daripada Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan rata - rata sebesar 420%.

Disamping capaian kinerja Kantor Wilayah, dapat pula disampaikan capaian kinerja UNIT PELAKSANA TEKNIS JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
				LP Kelas II PKP	LPN Kelas II PKP	LP Kelas IIB TJP	LP Kelas IIB Sungailiat	LPP PKP					
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	100%	97%	100%	97%	100%	97%	100%	97%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindak lanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.	71%	71%	100%	71%	100%	71%	100%	71%	100%	71%	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%	92%	100%	92%	100%	92%	100%	92%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan	75%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%

LKIP TAHUN 2021
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		kesehatan sesuai standar											
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%	23%	100%	23%	100%	23%	100%	23%	100%
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
		Nilai IKPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SMART	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Lembaga Pembinaan Khusus Anak				
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	67%	167%
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	88%	126%
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%
	Meningkatnya Anak yang memperoleh Hak Remisi	100%	39%	39%
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	97%	139%
	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan non formal	70%	100%	142%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	-	-
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	-	-
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	7.5%	10%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	75%	125%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	141%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	109%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	-	-
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	-	-
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	-	-
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	-	-
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	-	-

	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	-	-
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya data dokumen pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Rumah Tahanan Negara				
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Balai Pemasarakatan				
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	90%	100%
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90%	90%	100%
	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%	1%	100%
	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	75%	75%	100%
	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	50%	100%
	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	25%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di Lingkungan Masyarakat	75%	75%	100%
	Persentase Klien Pemasarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan Restoratif	36%	36%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara				
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60%	60%	100%
	Persentase Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum	40%	40%	100%
	Proses Pelayanan Pengelolaan Basan Baran	60%	60%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	100%
	Persentase Pmulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
Meninkanya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan Tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100%	100%	100%
	Nilai SMART	100%	100%	100%

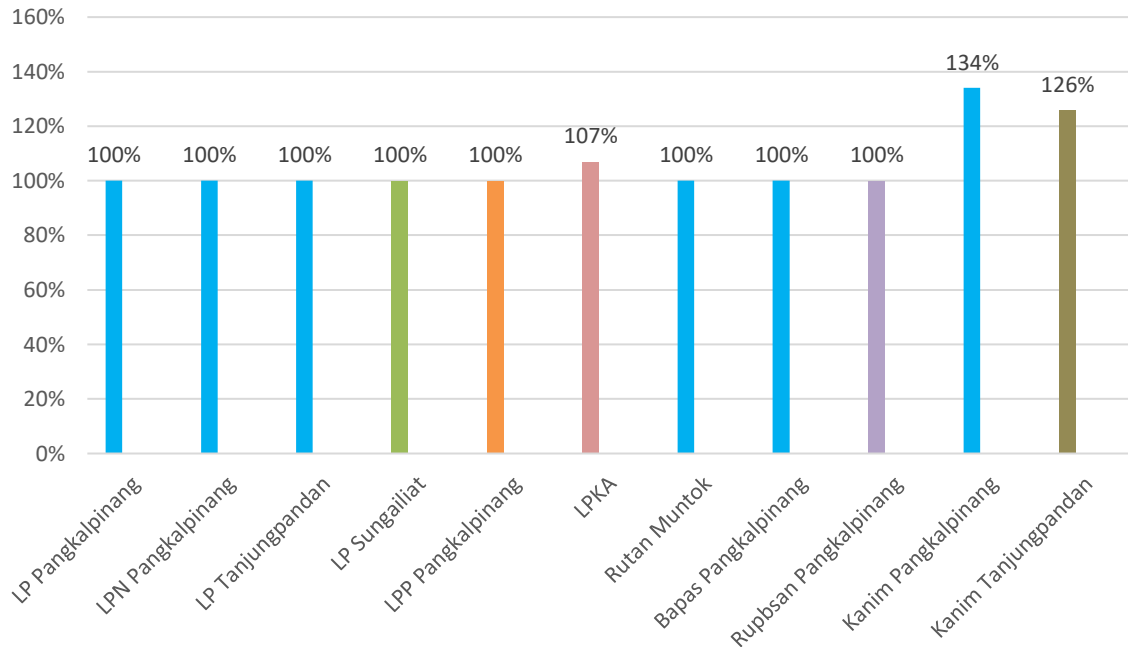
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
			Kanim Kelas I TPI PKP		Kanim Kelas II TPI TJP	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.9	122%	3.98	126%
	Indeks Kepuasan	3.11	3.2	180%	3.98	128%

	Internal di Wilayah					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.11	100%	3.91	126%

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkajene secara keseluruhan adalah **100%**
2. Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkajene secara keseluruhan adalah **100%**
3. Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan secara keseluruhan adalah **100%**
4. Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat secara keseluruhan adalah **100%**
5. Nilai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkajene secara keseluruhan adalah **100%**
6. Nilai capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkajene secara keseluruhan adalah **107%**
7. Nilai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok secara keseluruhan adalah **100%**
8. Nilai capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang secara keseluruhan adalah **100%**
9. Nilai capaian kinerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang secara keseluruhan adalah **100%**
10. Nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkajene secara keseluruhan adalah **134%**
11. Nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan secara keseluruhan adalah **126%**

Capaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan secara grafik sebagai berikut :



2. TARGET KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 27 Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah, memiliki 4 Target Kinerja
2. Kepala Divisi Administrasi memiliki 4 Target Kinerja
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 11 Target Kinerja
4. Kepala Divisi Pemasarakatan memiliki 6 Target Kinerja
5. Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 2 Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan *Action Plan* Target Kinerja mulai B03 hingga B12 tahun 2021 dengan capaian nilai sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilaimaturitas SPIP	100	100	100	100
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100
3	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi <i>Corporate University</i>	100	100	100	100
4	Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)	100	100	100	100

2. Kepala Divisi Administrasi

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi	100	100	100	100
2	Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100
3	Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	100	100	100	100
4	Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)	100	100	100	100

3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	100	100	100	100
2	Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah	100	100	100	100

	Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi				
3	Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah	100	100	100	100
4	Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah	100	100	95	96
5	Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah	100	100	100	100
6	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	100	100	100	100
7	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100
8	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang Cipta Kerja	100	100	100	100
9	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	100	100	100	100
10	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK- IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	100	100	100	100
11	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	100	100

4. Kepala Divisi Pemasyarakatan

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan	100	100	100	100
2	Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	100	100	100	100
3	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasyarakatan	100	100	100	100
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	100	100	100	100
5	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan,	100	100	100	100

	terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapasdan Rutan				
6	Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	100	100	100	100

5. Kepala Divisi Keimigrasian

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Pelayanan <i>EazyPassport</i>	100	100	100	100
2	Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	100	100	100	100

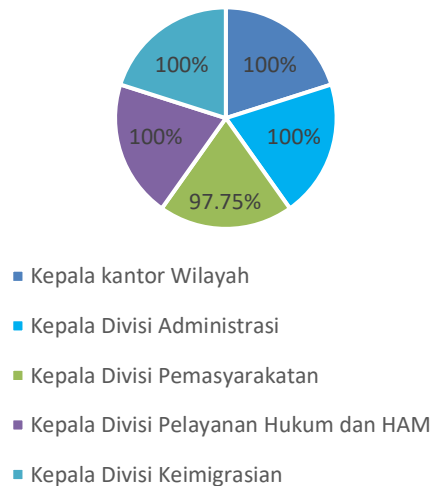
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berada pada Zona Hijau yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Target Kinerja Kepala Kantor Wilayah telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
2. Capaian Target Kinerja Kepala Divisi Administrasi telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
3. Capaian Target Kinerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah terdapat 1 (satu) indicator kegiatan yang belum sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 97,75%.
4. Capaian Target Kinerja Kepala Divisi Masyarakat telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
5. Capaian Target Kinerja Kepala Divisi Keimigrasian telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan capaian Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

No	Kepala Kantor Wilayah/Divisi	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Kepala Kantor Wilayah	100%	100%
2	Kepala Divisi Administrasi	100%	100%
3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	98,75%	97,75%
4	Kepala Divisi Pemasyarakatan	100%	100%
5	Kepala Divisi Keimigrasian	100%	100%

Capaian Target Kinerja Tahun 2021



Berdasarkan kondisi tabel diatas, terlihat bahwa Target Kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Keimigrasian masih menduduki Posisi Hijau dengan Nilai 100% sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2021. Sedangkan untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, belum memperoleh nilai 100% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dimana pada tahun 2020 nilai capaian target Kinerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar 98,75% terdapat kekurangan berdasarkan keterangan verifikator yaitu Data Dukung kurang sempurna berupa :

1. Surat Tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/pemangku kepentingan (belum ada surat tanggapan/hasil rapat);
2. Laporan Penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM (berdasarkan laporan yang terlampir, terdapat 1 kasus pengaduan masyarakat terkait permasalahan HAM)

Sedangkan Untuk Tahun 2021, nilai capaian target kinerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar 97,75% terdapat kekurangan berdasarkan keterangan verifikator yaitu belum melampirkan draft usulan IG, walaupun melampirkan surat pernyataan dari pihak teknis tetapi mengharapkan upaya dari Kantor Wilayah.

3. URAIAN CAPAIAN KINERJA

1. DIVISI ADMINISTRASI

1. Sasaran Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan; Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu; Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel; Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan; Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan; Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel; Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kepada masyarakat.

Target : 1 Layanan

Realisasi : 1 Layanan

Capaian : 117%

Pagu : Rp 14.406.404.000

Realisasi : Rp 14.355.100.218 (99%)

Keterangan : Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham mengampu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai Berikut :

1. Layanan Perkantoran Kanwil
2. Program dan Anggaran Kanwil
3. Manajemen Keuangan Kanwil
4. Pengelolaan Kepegawaian
5. Manajemen BMN Kanwil
6. Layanan Sarana Internal
7. Manajemen Kepegawaian Kementerian
8. Reformasi Birokrasi Kanwil
9. Hubungan Masyarakat Kanwil

10. Keprotokoleran Kanwil
11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kanwil TA 2021

2 DIVISI PEMASYARAKATAN

- 1 Sasaran Kegiatan : **Terwujudnya Penyelenggaraan PAS dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah**
Indikator Kinerja : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di Wilayah
Target 2021 : 80 %
Realisasi 2021 : Rp 30.312.400,-
Capaian 2021 : 80%
Keterangan : Pameran dan Layanan Kerjasama,Pengaduan,Perizinan dan informasi

- 2 Sasaran Kegiatan : **Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar**
Indikator Kinerja : 1. Persentase Menurunnya Tahanan yang *Overstaying*
Target 2021 : 70%
Realisasi 2021 : Rp 17.000.000,-
Capaian 2021 : 70%
Keterangan : Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan : **Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar**
Indikator Kinerja : 2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Target 2021 : 70%
Realisasi 2021 : Rp 17.000.000,-
Capaian 2021 : 70%
Keterangan : Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis

Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan : **Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar**
 Indikator Kinerja : 3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
 Target 2021 : 70%
 Realisasi 2021 : Rp 17.000.000,-
 Capaian 2021 : 70%
 Keterangan : Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

3 Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar**
 Indikator Kinerja 1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya
 Target 2021 60%
 Realisasi 2021 Rp 8.900.000,-
 Capaian 2021 60%
 Keterangan Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi.
 Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar**
 Indikator Kinerja 2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap
 Target 2021 40%
 Realisasi 2021 Rp 8.900.000,-
 Capaian 2021 40%

Keterangan	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi.
4 Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	1. Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian
Target 2021	60%
Realisasi 2021	Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	60%
Keterangan	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	2. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
Target 2021	97%
Realisasi 2021	Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	97%
Keterangan	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	3. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Target 2021	75%
Realisasi 2021	: Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	: 75%
Keterangan	: Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	: 4. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan
Target 2021	: 75%
Realisasi 2021	: Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	: 75%
Keterangan	: Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	: 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
Target 2021	: 13%
Realisasi 2021	: Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	: 13%
Keterangan	: Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

		Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	:	6. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
Target 2021	:	25%
Realisasi 2021	:	Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	:	25%
Keterangan	:	Koordinasi Dikumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja	:	7. Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
Target 2021	:	62%
Realisasi 2021	:	Rp 19.000.000,-
Capaian 2021	:	62%
Keterangan	:	Koordinasi Dikumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar
	Indikator Kinerja	1. Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga
	Target 2021	40%
	Realisasi 2021	Rp 39.640.000,-
	Capaian 2021	40%
	Keterangan	Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lemb

di Wilayah Sesuai Standar

Indikator Kinerja	:	2. Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pid Penjara
Target 2021	:	50%
Realisasi 2021	:	Rp 13.000.000,-
Capaian 2021	:	50%
Keterangan	:	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	:	3. Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
Target 2021	:	25%
Realisasi 2021	:	Rp 13.000.000,-
Capaian 2021	:	25%
Keterangan	:	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
6 Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	:	1. Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
Target 2021	:	70%
Realisasi 2021	:	Rp 15.560.000,-
Capaian 2021	:	70%
Keterangan	:	Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	:	2. Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
Target 2021	:	100%
Realisasi 2021		Rp 15.560.000,-
Capaian 2021		100%
Keterangan		Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Tel Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasaraka Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Tel Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarak dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lemb di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja		3. Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar
Target 2021		70%
Realisasi 2021		Rp 15.560.000,-
Capaian 2021		70%
Keterangan		Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja		4. Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
Target 2021		70%
Realisasi 2021		Rp 15.560.000,-
Capaian 2021		70%
Keterangan		Koordinasi Dilkumjakpol,Pemda,TNI, Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis

	Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan
7 Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	1. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
Target 2021	75%
Realisasi 2021	Rp 16.730.000,-
Capaian 2021	75%
Keterangan	Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan dan Informasi
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	2. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
Target 2021	60%
Realisasi 2021	Rp 68.515.300,-
Capaian 2021	60%
Keterangan	Pemindahan WBP, Pencegahan dan Penindakan Kamtib
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
Target 2021	75%
Realisasi 2021	Rp 163.214.400,-
Capaian 2021	75%
Keterangan	Pencegahan dan Penindakan Kamtib
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja	4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Target 2021	60%
Realisasi 2021	Rp 41.830.000,-
Capaian 2021	60%
Keterangan	Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban
8 Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah
Indikator Kinerja	: 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar
Target 2021	: 71%
Realisasi 2021	: Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	: 71%
Keterangan	: Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah
Indikator Kinerja	: 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
Target 2021	: 92%
Realisasi 2021	: Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	: 92%
Keterangan	: Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah

Indikator Kinerja	:	3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
Target 2021	:	95%
Realisasi 2021	:	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	:	95%
Keterangan	:	Rapat Kerja Teknis Masyarakat, Koordinasi Teknis Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Masyarakat
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah
Indikator Kinerja	:	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani
Target 2021	:	60%
Realisasi 2021	:	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	:	60%
Keterangan	:	Rapat Kerja Teknis Masyarakat, Koordinasi Teknis Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Masyarakat
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah
Indikator Kinerja	:	5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Target 2021	:	75%
Realisasi 2021	:	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	:	75%
Keterangan	:	Rapat Kerja Teknis Masyarakat, Koordinasi Teknis Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Masyarakat

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah
Indikator Kinerja	:	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Target 2021	:	75%
Realisasi 2021	:	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	:	75%
Keterangan	:	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah
Indikator Kinerja	:	7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)
Target 2021	:	60%
Realisasi 2021	:	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	:	60%
Keterangan	:	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasarakatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah
Indikator Kinerja	:	8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
Target 2021	:	23%

Realisasi 2021	Rp 14.900.000,-
Capaian 2021	23%
Keterangan	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Koordinasi Teknis Pemasyarakatan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

3 DIVISI KEIMIGRASIAN

I Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah
Indikator Kinerja	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah
Target 2021	: 3.15
Realisasi 2021	: 3.93
Capaian 2021	: 124 %
Keterangan	: Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari survey Balitbangham di tahun 2021 pada : 1. Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang : 3.89 2. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan : 3.97 Nilai rata-rata di wilayah BangkaBelitung : 3.9
II Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah
Indikator Kinerja	: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
Target 2021	: 3.11
Realisasi 2021	: 3.94
Capaian 2021	: 126 %
Keterangan	: Nilai Indeks IPK dari Survey Balitbangham di Tahun 2021 pada : Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang : 3.91 Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan : 3.97 Nilai rata-rata di wilayah Bangka Belitung: 3.94

- III Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah
- Indikator Kinerja : Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah
- Target 2021 : 3.11
- Realisasi 2021 : 3.91
- Capaian 2021 : 125 %
- Keterangan : Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) dari survey Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Divisi Keimigrasian Bangka Belitung : 3.91

4 DIVISI PELAYANAN HUKUM

- I. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM dan Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah.

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM
Target : 2 Instansi Pemerintah
Realisasi : 7 Instansi Pemerintah
Capaian : 350 %
2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM
Target : 1 Instansi Pemerintah
Realisasi : - Instansi Pemerintah
Capaian : - % (pada tahun 2021 ditiadakan)
3. Jumlah Instansi Pemerintah yang tindaklanjuti hasil diseminasi dan Penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Target : 1 Instansi
Realisasi : 10 Instansi
Capaian : 1000 %
4. Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
Target : 3 Rekomendasi
Realisasi : 4 Rekomendasi

Capaian : 130 %

Keterangan : Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah dilaksanakan dengan melaksanakan diseminasi HAM di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota, Koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di setiap Pemerintah Kab/Kota, pelayanan komunikasi masyarakat, FGD penilaian kabupaten/kota peduli HAM, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan pemajuan HAM, Penelaahan Perda berperspektif HAM.

II. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum dan meningkatnya efektivitas tugas MKNW, MPW dan MPD.

Indikator Kinerja:

1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah

Target : 5 %

Realisasi : 5 %

Capaian : 100 %

2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Target : 82 %

Realisasi : 82 %

Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah dengan cara pendaftaran kewarganegaraan, sosialisasi kewarganegaraan, verifikasi data kewarganegaraan, koordinasi dengan instansi terkait, Majelis Kehormatan Notaris, MPW Notaris, MPD Notaris, Rapat Koordinasi Notaris, pelantikan dan pengambilan sumpah notaris, PPNS dan kewarganegaraan, *monitoring* dan evaluasi pelayanan jasa, operasional pengadaan peralatan penunjang pelayanan jasa hukum kewarganegaraan, sosialisasi fidusia, pemantauan dan pembinaan fidusia, program peningkatan kompetensi pegawai.

III. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah dan terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah.

Indikator Kinerja :

1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Target : 2 Kegiatan

Realisasi : 7 Kegiatan

Capaian : 350 %

2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Target : 77 %

Realisasi : 77 %

Capaian : 100 %

3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangan

Target : 79 %

Realisasi : 79 %

Capaian : 100 %

4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Target : 76.61%

Realisasi : 76.61%

Capaian : 76.61%

5. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Target : 70 %

Realisasi : 70 %

Capaian : 100 %

6. Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Target : 20 %

Realisasi : 20 %

Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang atau

kelompok orang miskin, non litigasi maupun litigasi kepada orang atau kelompok orang miskin, pembinaan dan pembentukan desa sadar hukum, pemberian pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di daerah, Penyuluhan Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masa pandemi *Covid-19*, inventarisasi Propemperda, Analisa dan Evaluasi Produk Hukum, penyusunan Naskah Akademik, peningkatan layanan dokumentasi dan jaringan informasi.

IV. Sasaran Kegiatan : Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah dan terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja :

1. Presentase rancangan perda yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah

Target : 10 Raperda

Realisasi : 26 Raperda

Capaian : 260 %

2. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Target : 16 Orang

Realisasi : 30 Orang

Capaian : 210 %

Keterangan : Penyelenggaraan kegiatan berupa fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah dan mediasi konsultasi peraturan daerah serta pembinaan dan pendalaman materi terhadap perancang perundang-undangan.

V. Sasaran Kegiatan : Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Indikator Kinerja:

1. Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Target : 70 %

Realisasi : 70 %
Capaian : 100 %

2. Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

Target : 1 Buku
Realisasi : 1 Buku
Capaian : 100 %

Keterangan : Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi buku pedoman hasil penelitian dan pengembangan HAM terkait Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Pelayanan Keimigrasian di Wilayah.

VI. Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal

Indikator Kinerja :

1. Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah

Target : 16 Permohonan
Realisasi : 34 Pemohon
Capaian : 212 %

2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Intelektual oleh Kantor Wilayah

Target : 1 Lokus
Realisasi : 3 Lokus
Capaian : 300 %

3. Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual

Target : 100 %
Realisasi : 100 %
Capaian : 100%

4. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Target : 1 Kegiatan

Realisasi : 1 Kegiatan

Capaian : 100 %

5. Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

Capaian : 100 %

Keterangan : Terealisasinya permohonan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021

NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSE NTASE (%)
1	KANTOR WILAYAH			
	KANWIL (SETJEN)	14.406.404.000	14.349.040.304	99,60%
	KANWIL (AHU)	1.858.350.000	1.855.105.000	99,83%
	KANWIL (PAS)	772.182.000	769.482.100	99,65%
	KANWIL (IMIGRASI)	1.104.760.000	1.094.856.400	99,10%
	KANWIL (KI)	753.549.000	752.475.505	99,86%
	KANWIL (PP)	172.285.000	171.926.500	99,79%
	KANWIL (DITJEN HAM)	242.497.000	241.465.000	99,57%
	KANWIL (BPHN)	1.061.699.000	1.056.635.600	99,52%

	KANWIL (BALITBANG KUMHAM)	203.065.000	202.129.000	99,54%
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	9.952.419.000	9.871.711.314	99,19%
3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	9.454.258.000	9.248.317.721	97,82%
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	6.018.158.000	5.958.818.620	99,01%
5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	15.997.604.000	15.854.748.597	99,11%
6	BAPAS PANGKALPINANG	3.686.984.000	3.676.448.127	99,71%
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	1.713.855.000	1.707.078.457	99,60%
8	RUTAN MUNTOK	4.688.978.000	4.670.547.613	99,61%
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	8.591.371.000	7.587.793.301	88,32%
10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	6.101.668.000	5.154.553.127	84,48%
11	LPP PANGKALPINANG	4.750.112.000	4.738.921.573	99,76%
12	LPKA PANGKALPINANG	4.615.359.000	4.361.315.994	94,50%
TOTAL		96.145.557.000	93.323.369.853	97,06%

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 93.323.369.853,- dengan persentase 97,06% dari pagu anggaran sebesar Rp. 96.145.557.000,-

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2021 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Nilai Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 340% (tiga ratus empat puluh persen), meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan rata - rata sebesar 154,2%. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Terdapat 45 Indikator Kegiatan Kegiatan yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
2. Terdapat 8 Indikator Indikator Kegiatan yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2021 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
3. Terdapat 1 Indikator Kegiatan yang Nilai Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 kurang dari target (dibawah 100%) yaitu 80% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada setiap Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

I. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 114%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2021 dengan DIPA **Rp 14.406.404.000,-** sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan secara keseluruhan sebesar **Rp 14.355.100.218,-** atau dipersentasekan **99%**.

II. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- a. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan selama periode anggaran tahun 2021;
- b. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dengan catatan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan di tahun anggaran 2022 untuk mencapai target yang ditetapkan;
- c. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2022;
- d. Realisasi anggaran tahun 2021 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BALITBANG HUKUM & HAM dan BPHN adalah **99.73 % per tanggal 31 Desember 2021**.
- e. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan rata rata capaian kinerja keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar **99.68 %** Dari sebanyak 6 program utama Divisi. Rincian rata-rata sebagai berikut:
 - 6 (enam) (100 %) program dengan capaian kinerja keuangannya tinggi.

III. Divisi Keimigrasian

Dari uraian LAKIP Divisi Keimigrasian Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sudah terpenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan.
2. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian per November Tahun 2020 sebesar **Rp. 802.662.900** atau **54,3%** dari total anggaran sebesar **Rp.1.476.450.000,-**. Namun dikarenakan Maksimum Pencairan dikurangi, total Anggaran menjadi **Rp. 905.870.000**.

IV. Divisi Pemasyarakatan

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Divisi Pemasyarakatan telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
2. Secara umum pelaksanaan kegiatan telah dapat mencapai target yang ditetapkan;
3. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu dioptimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya;
4. Realisasi anggaran Tahun 2021 untuk Divisi Pemasyarakatan adalah sebesar **99.6%** per 29 Desember 2021

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Capaian Kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi target di dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 2021, di dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, masalah/kendala peluang dan adanya keberhasilan serta kegagalan :

1. Tantangan

- a. Luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;
- c. Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan beban kerja;
- d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai masih terbatas;
- e. Belum tercukupinya kualitas aparatur pelaksana.

2. Masalah / Kendala

Kondisi Pandemi *Covid-19* dan pemberlakuan PPKM Level 2 pada Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai pada awal bulan Maret 2020 s/d sekarang ini, sedikit banyak telah menghambat pelaksanaan dan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Imbas dari kondisi yang ada, penyerapan anggaran menjadi tidak optimal sesuai dengan *disbursement plan* yang telah disusun. Misalnya Kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang telah direncanakan secara langsung/tatap muka, akan tetapi dilakukan secara *Virtual* melalui *Zoom Meeting*. Selain itu, terdapat kendala lain antara lain :

- a. Kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan para pegawai;
 - b. Kualitas Internet yang masih kurang baik koneksinya di daerah.
3. Peluang
- a. Motivasi kerja aparatur yang baik;
 - b. Hubungan kerja antar instansi penegak hukum yang baik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Dukungan peraturan perundang – undangan;
 - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi Kantor Wilayah.

2. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas masih perlu ditindak lanjuti terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan juga Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Administrasi pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pemasarakatan pada tahun berikutnya disarankan untuk :
 1. Dalam rangka tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP yang baik perlu setiap tahunnya dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKIP.
 2. Pelaksanaan Kegiatan harus memperhatikan kalender kerja yang baik di pusat maupun daerah.
 3. Untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan agar diprioritaskan anggarannya tiap tahun.

4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun berikutnya disarankan untuk :
 1. Peningkatan sinergitas antar pihak terkait terutama di dalam internal maupun eksternal Divisi serta penguatan upaya sinergitas level yang semula di setiap kegiatan program hanya berskala sedang akan ditingkatkan menjadi skala besar di TA 2022;
 2. Penguatan komitmen dan kapasitas SDM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi prioritas di TA 2022 mengingat akan ada penyesuaian program pemerintah pusat di Tahun 2022 yaitu Program Prioritas Penguatan SDM;
 3. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing-masing bidang pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan mengarahkan kepatuhan dan ketepatan pembentukan perencanaan program kerja dengan pelaksanaan program kerja yang berbasis Output dan Outcome;

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmenkumham RI No. M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2022 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2021.

Berikut Tabel Rincian Komponen Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 :

A. Divisi Administrasi (Sekjen)

Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persen (%)
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
Layanan Perkantoran Kanwil	12.652.656.000	12.607.341.518	45.314.482	99%
Program dan Anggaran Kanwil	112.100.000	111.908.300	191.700	99,8%
Manajemen Keuangan Kanwil	125.282.000	124.921.300	360.700	99,7%
Manajemen BMN Kanwil	118.902.000	118.802.700	99.300	99,9%
Layanan Sarana Internal	645.645.000	643.738.200	1.906.800	99,7%
Manajemen Kepegawaian Kementerian	481.920.000	480.156.700	1.763.300	99,6%
Reformasi Birokrasi Kanwil	37.609.000	37.066.000	543.000	98,5%
Hubungan Masyarakat Kanwil	172.990.000	172.238.000	752.000	99,5%
Keprotokoleran Kanwil	14.180.000	13.808.000	372.000	97,3%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kanwil TA 2021	45.120.000	45.119.500	500	99,9%
TOTAL	14.406.404.000	14.355.100.218	51.503.782	99,6%

B. Divisi Keimigrasian (Ditjenim)

KEGIATAN	ANGGARAN (DITJENIM)	REALISASI	SISA	PERSEN TASE
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN				
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum	1.104.760.000	1.094.856.400	9.903.600	99 %
TOTAL KESELURUHAN	1.104.760.000	1.094.856.400	9.903.600	99 %

C. Divisi Pemasyarakatan (Ditjenpas)

KEGIATAN	ANGGARAN (DITJENPAS) (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSE NTASE (%)
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN FUNGSI PAS DI WILAYAH				
1. Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI	21.110.000,-	20.669.000,-	441.000,-	97.9%
2. Rapat Kerja Teknis PAS	29.191.000,-	29.174.800,-	16.200,-	99.9%
3. Koordinasi Teknis PAS	149.603.000,-	149.411.300,-	191.700,-	99.8%
4. Pameran Hasil Karya Narapidana	500.000,-	0	500.000,-	0%
5. Monitoring dan Evaluasi	98.950.000,-	98.464.600,-	485.400,-	99.5%
PEMBINAAN LAYANAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH				
1. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan PAS di Wilayah	151.552.000,-	151.162.500,-	389.500,-	99.7%
2. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan dan Informasi	47.116.000,-	47.042.200,-	73.800,-	99.8%
OPERASI PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH				
1. Pencegahan dan Penindakan Kamtib	194.530.000,-	194.265.100,-	264.900,-	99.8%
2. Pemindahan WBP	37.500.000,-	37.462.600,-	37.400,-	99.9%
3. Pembinaan Satuan Tugas Kamtib	42.130.000,-	41.830.000,-	300.000,-	99.3%
TOTAL KESELURUHAN	772.182.000,-	769.482.100,-	2.699.900,-	99.6%

D.Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KEGIATAN	ANGGARAN (DITJEN HAM)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENT ASE
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH				
DISEMINASI HAM	61.220.000	60.989.000	231.000	99.62 %
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA	90.730.000	90.589.000	141.000	99.84 %
KABUPATEN KOTA/PEDULI HAM	32.270.000	32.126.000	144.000	99.55 %
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	43.880.000	43.505.000	375.000	99.14 %
TELAAHAN REKOMENDASI PRODUK HUKUM DAERAH BERSFEKTIF HAM	9.337.000	9.230.000	107.000	98.85 %
TOTAL	242.497.000	241.465.000	1.032.000	99.57 %
KEGIATAN	ANGGARAN (BALITBANG KUMHAM)	REALISASI	SISA	PERSENT ASE
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH				
PENGAJIAN/ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM DIWILAYAH	196.920.000	195.990.000	930.000	99.52 %
PENGEMBANGAN HASIL PENELITIAN HUKUM DAN HAMDI WILAYAH	6.145.000	6.139.000	6.000	99.9 %
TOTAL	203.065.000	202.129.000	936.000	99.54 %
KEGIATAN	ANGGARAN (DITJEN AHU)	REALISASI	SISA	PERSENT ASE
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH				
PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH	1.858.350.000	1.855.105.000	3.245.000	99.82 %
TOTAL	1.858.350.000	1.855.105.000	3.245.000	99.82 %
KEGIATAN	ANGGARAN (DITJEN PP)	REALISASI	SISA	PERSENT ASE
PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN HUKUM DI DAERAH				
FASILITASI HARMONISASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	139.057.000	138.952.500	104.500	99.92 %

MEDIASI DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH	13.026.000	12.965.000	61.000	99.53 %
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH				
PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH	20.202.000	20.009.000	193.000	99.04 %
TOTAL	172.285.000	171.925.500	385.500	99.79 %
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH				
KEGIATAN	ANGGARAN (BPHN)	REALISASI(Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH				
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH	99.513.000	99.376.700	136.300	99.86 %
FASILITASI JDIHN	102.807.000	100.884.000	1.923.000	98.12 %
FASILITASI KELOMPOKDESA SADAR HUKUM	145.000.000	142.807.000	2.193.000	98.48 %
PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM	33.233.000	32.433.000	800.000	97.57 %
LAYANAN PENYULUHAN HUKUM	43.120.000	42.874.200	245.800	99.42 %
VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH DIWILAYAH	43.706.000	43.705.400	600	99.99 %
LAYANAN BANTUAN HUKUM	540.000.000	540.000.000	0	100 %
KEGIATAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI	97.440.000	97.440.000	0	99.35 %
TOTAL	1.061.699.000	1.056.688.600	5.010.400	99.52 %
PENYELENGGARAAN KI DI WILAYAH				
KEGIATAN	ANGGARAN (DITJEN KI)	REALISASI	SISA	PERSENTASE
PENYELENGGARAAN KI DI WILAYAH				
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH	753.549.000	752.504.950	1.044.050	99.86 %
TOTAL	753.549.000	752.504.950	1.044.050	99.86 %



KEMENKUMHAM RI

SEMAKIN *PASTI* MENUJU INDONESIA MAJU

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan



**KUMHAM
*PASTI***

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
Masyarakat Manusia**